

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian sasaran anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang dilihat melalui konsistensi perencanaan dan penganggaran pada dokumen Renja dan DPA Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2021 dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan capaian target kinerja pada LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2021.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari tingkat konsistensi program dan kegiatan, konsistensi tertinggi ada pada dokumen Renja dan DPA tahun 2021 yaitu 100% untuk konsistensi program dan 85,71% untuk konsistensi kegiatan. Konsistensi yang lebih rendah ada antara Renja dan DPA tahun 2020 yaitu 100% untuk konsistensi program dan 73,33% kegiatan yang konsisten. Sedangkan jumlah kegiatan yang tidak konsisten antara Renja dan DPA terbilang cukup sedikit yaitu 21,21% pada tahun 2019, 26,66% pada tahun 2020, dan 14,28% di tahun 2021. Penyebab ketidakkonsistenan antara dokumen Renja dan DPA ini adalah :
 - a. Keterbatasannya anggaran yang tersedia mengakibatkan tidak semua kegiatan dapat diakomodir.
 - b. Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan
 - c. Belum memadainya kualitas dan kapasitas SDM dalam bidang perencanaan

2. Tingkat konsistensi indikator kinerja, target kinerja dan alokasi anggaran cukup rendah, pada tahun 2019 ada 8 kegiatan yang memiliki indikator kinerja, target capaian kinerja dan pagu dana yang sesuai, tahun 2020 hanya ada 2 kegiatan, sedangkan di tahun 2021 tidak ada kegiatan yang memiliki indikator kinerja, target capaian kinerja dan pagu dana sesuai.
3. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pariwisata pada tahun 2019 termasuk dalam predikat sangat baik, yaitu rata-rata capaian 436,96%. Dari 7 indikator capaian kinerja terdapat 6 indikator yang telah berhasil mencapai kategori sangat baik dan 1 indikator masih belum yaitu Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus.
4. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pariwisata pada tahun 2019 dapat di kategorikan dalam predikat gagal dengan rata-rata capaian -1.229,96%. Rata-rata capaian yang sangat rendah ini karena capaian indikator Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi) yang sangat rendah. Dari 6 indikator kinerja yang disepakati terdapat 2 indikator masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan.
5. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pariwisata pada tahun 2021 masuk dalam predikat gagal sama dengan tahun sebelumnya dengan rata-rata capaian -1.763,76%. Rata-rata capaian ini sangat rendah karena capaian indikator Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi) yang sangat rendah. Dari 6 indikator kinerja yang disepakati untuk dicapai hanya 4 indikator telah berhasil mencapai kategori sangat baik.

5.2 Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya terdapat sinkronisasi antara target kinerja, program atau kegiatan, dan alokasi anggaran tahunan yang tercantum pada dokumen perencanaan anggaran SKPD. Kesesuaian antara target capaian kinerja pembangunan yang direncanakan dengan anggaran dan dokumen pelaksanaan merupakan ukuran kualitas perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Namun, pada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan antara dokumen Renja dan DPA tahun 2019-2021 yaitu, adanya keterbatasan anggaran, terjadinya perubahan nomenklatur program atau kegiatan, dan belum memadainya kualitas dan kapasitas SDM di bidang perencanaan.

Selain itu, pada penelitian ini juga menunjukkan bagaimana perbandingan capaian kinerja dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di tahun 2019-2021. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 indikator kinerja peningkatan jumlah kunjungan wisman dan wisnus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020-2021 jumlah kunjungan wisatawan turun drastis akibat dari dampak pandemi covid-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat harus menyusun strategi agar sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Barat dapat dioptimalkan kembali.

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini yaitu, kesulitannya mendapatkan dokumen perencanaan lain karena terbatasnya waktu penelitian sehingga evaluasi kesesuaian

sasaran anggaran yang dilakukan pada penelitian ini hanya berdasarkan dokumen Renja dan DPA Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat saja.

5.4 Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas SDM/pejabat perencana dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan, meningkatkan pengetahuan aparatur yang terkait dalam penyusunan anggaran serta meningkatkan komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di tahun 2019-2021 diharapkan dapat menjadi acuan bagaimana strategi untuk meningkatkan kinerja dinas dalam mencapai sasaran dan tujuan yang tertuang pada RPJMD.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan yang telah dipaparkan di atas, maka saran untuk peneliti selanjutnya adalah menambahkan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan Renstra untuk melakukan evaluasi kesesuaian sasaran anggaran agar menghasilkan hasil analisis yang lebih lengkap.